

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

"Change we can believe" itulah slogan yang dipakai Barak Obama dalam kampanye politik pada waktu itu. Menyikapi pernyataan yang disampaikan dalam tagline kampanye, mengindikasikan adanya muatan perubahan yang sangat mendasar. Pertanyaan berikutnya kemudian, Apakah presiden terpilih Barack Obama akan benar-benar mampu mewujudkan janji-janji politik yang tertuang dalam *"Change we can believe"* itu? Atau semua janji politiknya hanya dijadikan alat untuk menarik simpati public?

Terlepas dari janji dan slogan serta tema kampanye yang mengusung *"Change we can believe"*. Tokoh-tokoh, yang dipilih oleh Presiden Barack Obama, antara lain, yang akan menduduki Menteri Luar Negeri (Menlu) adalah Senator Demokrat, New York, Hillary Clinton, yang merupakan rival Obama. Menteri Pertahanan (Menhan) adalah Robert Gate, yang sekarang masih menjabat Menhan, dipemerintahan Presiden Goerge W.Bush. Sedangkan, yang menduduki jabatan Kepala Keamanan Nasional (NSC) adalah Jenderal (Mar) Jim Jone, mantan Panglima Nato, di Eropa. Sementara itu, Presiden Barack Obama, memilih Dennis C.Blair yang menjabat Direktur Intelijen Nasional. Komposisi yang menduduki Dewan Keamanan Nasional

yang menggambarkan betapa tim ini sangat kuat, karena didalamnya orang-orang yang memiliki kompetensi dibidang keamanan, pertahanan, dan kebijakan luar negeri. Pilihan yang dilakukan Presiden Barack Obama ini, merupakan pewujudan janjinya untuk membentuk suatu kebijakan dibidang keamanan, pertahanan dan luar negeri yang kokoh, khususnya mengantisipasi situasi keamanan global.¹

Apabila diamati hal ini sangat ironis, disatu sisi ingin mewujudkan perubahan melalui upaya yang lebih diplomatis, tetapi disisi lain masih ada indikasi kekerasan (dengan ditunjukannya Robert Gates sebagai menteri pertahanan). Artinya cara lama masih digunakan dalam arahan strategi politik Barack Obama. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul skripsi **Politik Luar negeri Amerika Serikat di Irak Pada Masa Kepemimpinan Barack H. Obama** sebagai bahan penelitian untuk memenuhi salah satu syarat menempuh pendidikan strata satu (SI).

B. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat adalah negara yang dapat dikatakan untung dalam masa berakhirnya perang dunia kedua, karena dari sisi Amerika Serikat mereka menang melawan para musuh-musuhnya sehingga menempatkan negara adidaya tersebut sebagai pemenang mutlak perang tersebut. Selain itu runtuhnya era komunisme pada akhir dekade Sembilan puluhan yang ditandai

¹ <http://www.eramuslim.com/berita/dunia/mumbai-tantangan-keamanan-obama.htm> diakses pada 12 desember 2009

dengan runtuhnya Uni Soviet, musuh utama AS semakin menandakan posisi AS sebagai negara yang penuh dengan hegemoni. Konsep dunia yang unipolar saat itu sangat terasa dimiliki oleh AS melalui berbagai doktrin-doktrinnya untuk mencapai tujuan nasional negaranya. Seperti doktrin Truman yang tujuannya adalah untuk membantu rekonstruksi negara-negara di Eropa Barat pasca perang dunia (lebih dikenal dengan politik pembendungan) serta Doktrin Monroe yang menggambarkan kepentingan nasional AS di belahan bumi barat melalui kebijakan-kebijakan yang di terapkan.

Pada masa kepemimpinan Presiden George.W Bush, politik luar negeri AS terlihat cenderung menggunakan Hard Power sebagai instrumen diplomasinya , terlebih lagi setelah peristiwa serangan 11 september 2001 yang semakin membuat politik luar negeri AS mencapai titik klimaksnya. Pada masa pemerintahan Bush state power ini didominasi oleh kekuatan neokonservatif yang menjadikan Bush sebagai simbol utamanya. Ketika AS dalam control Bush sebagai presidennya , Amerika dikucilkan , ditakuti , dan dibenci dunia. Lebih jauh dia menyatakan pemerintah hanyalah sekumpulan hipokrit yang duduk dalam kursi pemerintahan , menjadikan AS sekarang sebagai sebuah negara yang tidak “damai”.

Amerika Serikat, sebagaimana yang kita pahami bahwa Negara ini merupakan Negara yang selalu kontroversi dalam aktifitasnya di kancah perpolitikan internasional. Kebijakan yang dihasilkan seringkali mengundang

reaksi kontra, terutama dari negara-negara yang notabnya adalah Negara muslim.

Politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Amerika merupakan Negara yang memiliki segala unsur yang memungkinkan akan menghasilkan kekuatan yang akan mampu mempengaruhi peta perpolitikan Internasional.

Kebijakan luar negeri setiap negara adalah sebuah refleksi aspirasi negara yang bersangkutan dalam berhadapan dengan negara lain di seluruh dunia. Politik luar negeri tersebut paling tidak dipengaruhi oleh tiga faktor: kondisi politik dalam negeri (*domestic politics*), kemampuan ekonomi dan militer, serta lingkungan internasional.² Ketiga faktor itu juga yang ikut mempengaruhi pembentukan awal dasar dan arah politik luar negeri suatu Negara.

Dunia Barat menyambut dengan gembira terpilihnya Barack Obama sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat. Kebencian terhadap Bush dan ketidak populeran kebijakan Amerika selama 8 tahun sangat merusak citra ‘kebebasan dan demokrasi’ dan banyak orang yang berharap bahwa Obama akan menjadi sang penyelamat yang akan merubah image Amerika sebagai

² Lihat William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional* (terj), Bandung, Sinar Baru, 1992, khususnya bab III sampai bab V. Baca juga M. Riza Sihbudi, *Indonesia-Timur Tengah, Masalah dan Prospek*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hal. 11

sebuah negara yang suka perang di dunia.³ “*Dia disebut seorang naif idealis. Tapi dalam hal Politik Luar Negeri (PLN), dialah realis yang sebenarnya*”. Itulah pernyataan yang disebutkan dalam oleh *Fareed Zakaria of News Week* setelah terpilihnya Barack Obama sebagai presiden AS. Sebagai Negara yang kenal dengan istilah Campaign Demokrasi, AS merupakan Negara yang banyak menyita perhatian para ilmuwan politik, analis politik dan para negarawan terkait arahan kebijakan politik Luar Negeri AS ke sejumlah Negara di timur tengah, terutama ke Irak setelah terpilihnya Barack Obama sebagai presiden.⁴

Sejauh mana Barack Obama akan membawa Amerika? Ini pertanyaan yang terus mengusik saat kita mencermati langkah-langkah yang ia lakukan di masa-masa awal kepemimpinannya: Ia memerintahkan penutupan penjara-penjara bawah tanah NATO di Eropa, menutup penjara Guantanamo yang menjadi tempat penyiksaan, mendeklasifikasi memo presiden George W. Bush yang mengizinkan “penyiksaan” terhadap para tawanan, dan ia menawarkan komunikasi yang lebih waras dan lebih produktif dengan negara-negara lain yang sejauh ini masuk dalam kategori musuh-musuh Amerika.

³Dikutip dari *Press Release Hizbut Tahrir Inggris: Jabatan Presiden bagi Obama Tidak Membawa Perubahan Apapun Bagi Dunia Islam* London, UK. 5 November 2008

<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/07/jabatan-presiden-bagi-obama-tidak-membawa-perubahan-apapun-bagi-dunia-islam/>

⁴ Karena Irak merupakan Negara yang penulis jadikan study kasus dalam penelitian ini.

Ada perbedaan mendasar antara Partai Demokrat dan Partai Republik, walaupun kedua partai itu sama-sama menganut ideologi liberal ala Amerika. Partai Republik lebih menonjolkan nuansa konservatisme ketimbang Partai Demokrat yang lebih menonjolkan gaya puritan demokratis dari ideologi liberalisme.

Dibandingkan dengan Partai Republik, misalnya, Partai Demokrat cenderung tidak menggunakan kekuatan militer dalam penerapan politik luar negerinya. Persoalan HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup tetap menjadi bagian penting dari politik domestik dan luar negeri AS.

Partai Demokrat lebih memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi AS, jaminan sosial, penerapan pajak progresif yang konsisten (khususnya penarikan pajak yang tinggi pada orang kaya AS), pelayanan kesehatan yang lebih baik, perhatian pada pendidikan yang tersebar dan bermutu di seluruh negeri, dan lebih memilih untuk menggunakan kekuatan negara demi keadilan sosial.

Hal penting yang perlu dipahami, penerapan politik luar negeri AS tidak akan berubah secara total dan drastis dari pemerintahan Republik ke Demokrat. Berbagai perjanjian internasional atau MoU yang sudah ditandatangani AS dengan berbagai negara tentunya akan tetap berlaku dan

dihormati, termasuk berbagai hal yang terkait dengan peningkatan hubungan militer AS ke sejumlah Negara berkembang.⁵

"Change we can believe" itulah slogan yang dipakai Barak Obama dalam kampanye politik pada waktu itu. Menyikapi pernyataan yang disampaikan dalam tagline kampanye, mengindikasikan adanya muatan perubahan yang sangat mendasar. Pertanyaan berikutnya kemudian, Apakah presiden terpilih Barack Obama akan benar-benar mampu mewujudkan janji-janji politik yang tertuang dalam *"Change we can believe"* itu? Atau semua janji politiknya hanya dijadikan alat untuk menarik simpati public?

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah **"Bagaimana Politik Luar Negeri Amerika Serikat di irak pada Masa Kepemimpinan Barack obama?"**

D. Kerangka Pemikiran

Untuk mengeksplorasi lebih jauh persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis memerlukan beberapa kerangka dasar teori dan konsep yang sekiranya dapat mendukung penelitian ini, diantaranya:

Politik Luar Negeri menurut Hans J Morgenthau

⁵ Dikutip dari artikel yang berjudul *Obama dan Politik Luar Negeri AS* Yang ditulis oleh Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti. Source <http://aipi.wordpress.com/2009/01/19/obama-dan-politik-luar-negeri-as/>

Hans J Morgenthau menyatakan bahwa esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Maksudnya adalah bahwa politik luar negeri satu Negara didasarkan kepada kepentingan politik domestic, atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional Negara tersebut. Kepentingan nasional ini diartikan sebagai kelangsungan hidup (*survive*) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politiknya dan memelihara identitas kulturalnya.

Foreign Policy dari suatu Negara tidak lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan telah menjadi suatu kebutuhan dan keharusan demi menjaga eksistensinya di pentas internasional. Berbicara tentang *foreign policy* tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan Negara yang mendasari lahirnya *foreign policy* tersebut. Tidak tertutup kemungkinan, kepentingan-kepentingan antarnegara akan saling berbenturan apabila kepentingan-kepentingan tersebut dipertemukan. Jika itu yang terjadi, maka bisa jadi pertentangan antar Negara akan muncul dan akibatnya perdamaian dunia akan terancam.⁶

Tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara yang merupakan realisasi dari politik luar negeri sebenarnya merupakan hasil dari pembuatan keputusan

⁶ Frankin B Weinstain, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto* (Ithaca: Cornell University Press, 1976) Dari <http://dinasulaeman.wordpress.com/2009/09/26/analisis-kebijakan-luar-negeri-as-terhadap-israel-pada-era-obama/>. Diakses pada tanggal 27 juni 2010

mendetifiniskan situasi yang mencakup keadaan eksternal dan internal yang dianggap relevan oleh pembuat keputusan dengan masalah politik luar negeri tertentu.

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan nasional yang saling bertentangan. Ini bukan suatu idea yang dicapai secara abstrak dan saintifik, tetapi merupakan hasil persaingan politik internal yang berlangsung terus menerus. Pemerintah, melalui lembaga-lembaganya, yang pada akhirnya paling bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional.

Foreign policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of state vis a vis other state or international entities, aimed at achieving specific goals define of national interest.⁷

Jadi politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Jadi politik luar negeri dapat digunakan atau terjadi apabila interaksi yang dilakukan dalam bentuk hubungan masyarakat Internasional bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional.

⁷ Jack C. Plano and Roy Olton, The Internasional Relation dictionary. Renered and wiastone inc. USA, 1969, e 7

Politik Luar Negeri Amerika Serikat sama seperti politik luar negeri pada umumnya selalu bervariasi dan seringkali berubah-ubah. Perubahan itu diakibatkan oleh adanya benturan baik dengan factor-faktor eksternal yakni benturan dengan situasi Internasional yang sedang berkembang. Meski dalam pelaksanaannya politik luar negeri Amerika Serikat memiliki Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Kepentingan nasional tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan sumberdaya-sumberdaya internal. Diperlukan kombinasi dan sinergi yang kuat diantara berbagai sumberdaya internal dan eksternal negara.

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah inisiatif atau sebagai sebuah reaksi atas inisiatif yang dilakukan oleh negara lain. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pelaksanaan kepentingan nasional yang relatif terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.⁸

⁸ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, (Jakarta: Putra A. Bardin, 1999), hlm. 5.

Dalam dekade terakhir ini, Amerika dipimpin oleh dua presiden yang memiliki perbedaan yang relatif signifikan. Namun yang pasti antara George Walker Bush dan Barack Obama memiliki kepentingan yang sama, yakni mencapai segenap kepentingan nasional Amerika serta menjaga status kepemimpinan Amerika di dunia. Adalah lazim jika perbedaan latar belakang menjadikan kedua presiden itu memiliki gaya kepemimpinan dan kebijakan yang berbeda baik dalam kapasitas nasional maupun internasional.

Untuk menjaga kepentingan nasionalnya sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia, pada masa kepemimpinannya Bush pernah mengumandangkan "Doktrin Bush". Setelah peristiwa 11 September 2001, dihadapan kongres Amerika Serikat tanggal 20 September 2001, Bush mengeluarkan ancaman kepada dunia internasional, "*Either you with us or you are with the terrorist*". Bush juga mengatakan, "*If you are not with us, you are against us*". Pernyataan yang lebih dikenal dengan Doktrin Bush ini jelas-jelas memaksa negara-negara lain di dunia menentukan sikap dan seolah telah membagi bumi menjadi dua belahan, yakni teroris dan bukan teroris.¹ Doktrin inilah yang seakan melegitimasi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dengan alasan untuk menumpas terorisme.

Walaupun cukup menuai kontroversi, namun tidak lama waktu berselang, tepatnya pada tahun 2002, Bush mengumumkan doktrin *preemption* dalam pidatonya di hadapan lulusan Akademi Militer West Point. Doktrin yang juga dikenal dengan istilah *Preemptive Military Strikes Doctrine*

ini adalah kebijakan yang merupakan bagian dari strategi keamanan Amerika Serikat dalam upaya menjaga kepentingan nasionalnya.² Dapat dikatakan bahwa doktrin inilah yang membuka jalan menuju invasi Amerika ke Irak tahun 2003.

Pergantian kepemimpinan Amerika membuat penggunaan doktrin Bush itu perlu dikaji kembali. Selain itu Kongres Amerika juga menuntut pemerintah agar melaporkan strategi keamanan nasional setiap tahunnya. Untuk itu, Pentagon di bawah presiden Obama pun perlu menilai kembali kebijakan-kebijakan dan berbagai doktrin perang yang harus dikaji setiap empat tahun. Menurut Kahleen Hicks, *deputy undersecretary* Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat mengatakan bahwa kebijakan perang dan doktrin pada masa Bush kini sedang ditinjau ulang dan jika Pentagon menganggapnya tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini maka kebijakan itu akan dicabut *dalam Quadrennial Defense Review* (peninjauan pertahanan tiap empat tahun) mendatang.⁹

Meskipun administrasi Obama belum membeberkan doktrin keamanannya dihadapan Kongres, namun berbagai indikasi seputar doktrin Obama telah diperkirakan dan dipelajari oleh berbagai pihak. Dari dalam Gedung Putih dan Pentagon sendiri, telah terlihat indikasi bahwa Obama ingin

⁹ Althaf, "Akankah Obama Mengubah Doktrin Perang Bush? Diperoleh dari <http://www.arahmah.com/index.php/news/read/5884/akankah-obama-mengubah-doktrin-perang-bush>; Internet, diakses tanggal 1 April 2008.

memperbarui doktrin penggunaan kekerasan itu dan akan mulai mempertanggungjawabkannya. Meskipun berbagai pengamat juga mengindikasikan bahwa Obama mungkin akan mempertahankan doktrin warisan Bush ini untuk melancarkan agenda perang melawan terorisme di masa depan, namun penggunaannya akan dipersempit dengan gaya yang lebih populis untuk mengahkiri pandangan dan pencitraan negatif tentang hak asasi manusia dan kemanusiaan yang terjadi akibat pelaksanaan doktrin Bush tersebut.¹⁰

Hingga saat ini meskipun pemerintahan Barack Husein Obama sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-44 tengah berjalan, belum terdengar pernyataan penting dari Obama menyangkut akibat dari pelaksanaan doktrin Bush itu, kecuali rasa prihatin dan tidak lebih dari itu. Akankah doktrin Obama yang membawa perdamaian abadi di Timur Tengah, atau bisakah Obama mengendalikan Israel? Memang harus menunggu waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Meskipun nampaknya belum terlihat "cahaya diujung terowongan", namun banyak pihak yang berharap Obama dapat melakukan perubahan penting.¹¹

Dalam mengatur dan menjalankan politik luar negeri sebagai upaya untuk menguasai dunia demi mencapai tujuan nasional, presiden memiliki

¹⁰ Ibid

¹¹ Denny Darjaman, "Patung Obama dan Sebuah Harapan" diperoleh dari <http://darjaman.wordpress.com/2010/01/04/patung-barack-husein-obama-dan-sebuah-harapan/>; Internet, diakses tanggal 1 April 2010.

wewenang dan tanggung jawab paling besar. Presiden memiliki hak untuk mengambil segenap tindakan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan negara. Dengan penjelasan dua poin sebelumnya, dapat dilakukan pemaknaan ataupun telaah mengenai doktrin yang dikeluarkan oleh presiden Amerika Serikat dalam konteks politik luar negeri terhadap lingkungan eksternalnya demi menjaga kepentingan internal Amerika.

E. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diambil hipotesis bahwa Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Irak pada Masa Kepemimpinan Barack Obama:

1. Amerika Serikat merencanakan penarikan pasukan militer yang berada di Irak dengan tujuan memfokuskan perhatian kepada pembangunan ekonomi dalam negeri.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research dengan menggunakan documentary analysis. Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif. Data yang dijadikan bahan rujukan penulisan skripsi ini menggunakan bentuk study pustaka yang berasal dari perpustakaan, media internet, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku teks, newspaper dan some periodicals.

G. Sistematika Penulisan

Judul: POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI IRAK PADA MASA KEPEMIMPINAN BARAK H. OBAMA

Penulisan BAB I yang terdiri dari Pendahuluan, Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Penulisan BAB II yang terdiri dari Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Irak, Hubungan Amerika Serikat dengan Irak, Garis Besar Politik Luar Negeri Amerika Serikat.

Penulisan BAB III yang terdiri dari Dinamika Hubungan Amerika Serikat-Irak, Hubungan Amerika Serikat dengan Irak pada masa Bush, Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada masa George Bush, Faktor-faktor Intervensi Amerika Serikat Atas Irak, Irak Pada Masa Pemerintahan Goerge W. Bush

Penulisan BAB IV yang terdiri dari Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Irak, Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada masa Barack Obama, Ekonomi Sebagai Prioritas Politik Luar Negeri Amerika Serikat, Penarikan Pasukan militer Amerika Serikat

Penulisan BAB V yang terdiri dari Kesimpulan